

# BAB I

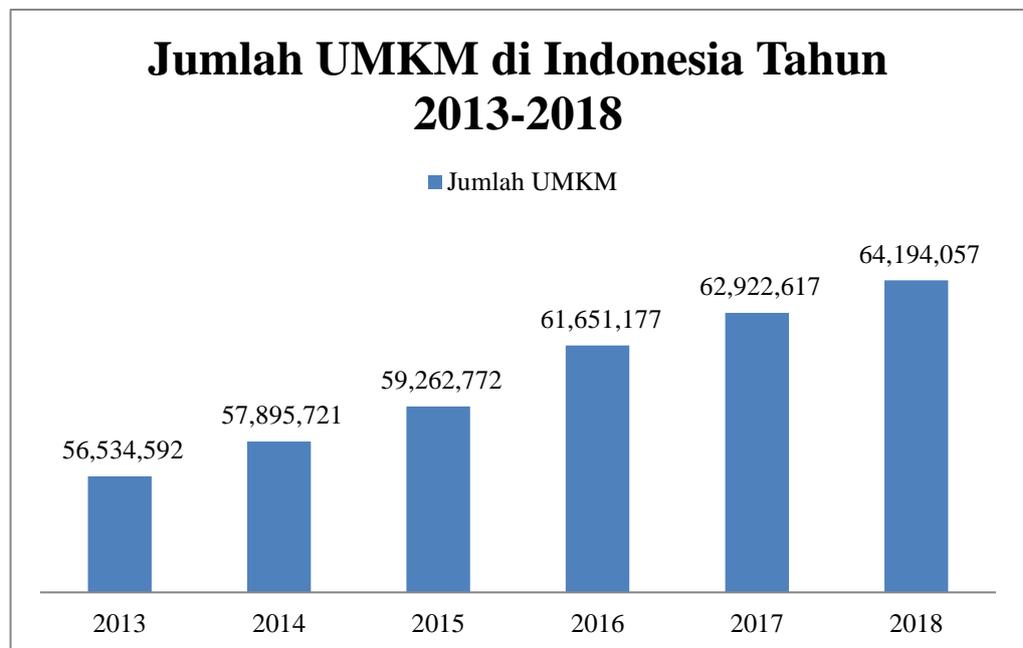
## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Penelitian

Merebaknya wabah COVID-19 ke seluruh penjuru dunia tak hanya memberikan dampak yang buruk di bidang kesehatan, akan tetapi turut serta memberikan dampak yang buruk di bidang sosial-ekonomi masyarakat. Hal ini turut membuat pemerintah turun tangan dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 mengenai Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Dengan adanya peraturan tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan jaga jarak fisik, karantina daerah, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) agar masyarakat membatasi kegiatannya di luar rumah yang digantikan dengan metode pembelajaran dan bekerja di rumah secara daring. Adanya kebijakan pandemi Covid-19 saat ini turut menghambat para pelaku ekonomi, salah satunya yang paling terdampak ialah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

UMKM sangat berperan dalam membuat lapangan pekerjaan, meratakan penghasilan serta mendorong kesejahteraan masyarakat. Terganggunya roda penggerak ekonomi UMKM tentu menurunkan tingkat perekonomian dan juga meningkatkan pengangguran. UMKM sendiri diketahui telah menjadi penggerak perekonomian di Indonesia, apalagi saat terjadinya krisis moneter tahun 1997-1998. Namun berbeda halnya dengan pandemi Covid-19 saat ini, sektor UMKM tidak mampu menjalankan operasional bisnisnya seperti sedia kala. Sehingga tak heran pemerintah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap keberlangsungan UMKM. Menteri Keuangan, Sri Mulyani menuturkan, bahwa ada kemungkinan terjadinya penurunan *Non Performing Loan* (NPL) perbankan terhadap UMKM yang disebabkan oleh

ketidakmampuan sektor UMKM dalam memenuhi kewajiban kreditnya dimana merupakan akibat dari terhambatnya kegiatan usaha mereka, sehingga hal ini disinyalir dapat memperburuk keadaan perekonomian. (republika.co.id)



Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM RI yang diolah dari data BPS

Gambar 1. Grafik Jumlah UMKM di Indonesia Tahun 2013-2018

Gambar diatas menunjukkan data perkembangan jumlah unit UMKM di Indonesia yang kian bertambah selama periode 2013-2018. Meski begitu, jumlah unit UMKM di Indonesiamasih tergolong rendah, maka pemerintah terus berupaya meningkatkan perkembangan UMKM dengan mengeluarkan berbagai kebijakanberupa program bantuan serta kemudahan pelayanan dalam regulasi bisnis UMKM.

Sebagaimana dituturkan oleh Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Simanjorang (2020), bahwasannya Jakarta selaku kota jasa, mobilitas masyarakat dalam penggerak utama dari seluruh kegiatan perniagaan. Ketika pergerakan masyarakat dibatasi dengan kebijakan PSBB oleh pemda DKI Jakarta,

maka ruang gerak masyarakat akan semakin sempit, sehingga kegiatan perniagaan kian terbatas atau stagnan. (investor.id)

Untuk mengurangi dampak dari hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta turut berupaya membina pelaku UMKM dalam memasarkan penjualannya melalui media sosial. Ratu (2020), sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah bekerjasama dengan beberapa *marketplace*, seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Bukalapak untuk membantu para pelaku UMKM dalam memasarkan beragam produk secara daring tanpa dipungut biaya. (ayo jakarta.com)

Pada tahun 2018, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM dan PTSP) DKI Jakarta telah menerbitkan sebanyak 17.537 izin usaha pelaku UMKM. Dari 5.040 UMKM yang telah mendapat izin usaha, mampu menyerap tenaga kerja 9.899 dan nilai investasinya mencapai Rp 114,98 miliar (beritajakarta.id).

Tahun 2019, Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu atau biasa disebut PKT guna mengembangkan sektor UMKM. Dalam programnya terdapat berbagai rangkaian kegiatan yang bekerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat untuk mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian usaha masyarakat Jakarta. Program ini diharapkan dapat mengurangi pengangguran serta menambah kesejahteraan penduduk dengan memberikan fasilitas kewirausahaan dan peningkatan kapasitas wirausaha, adanya pembinaan kelembagaan serta pemantauan dan evaluasi.

Tabel 1. Jumlah UMKM di Kecamatan Jagakarsa Tahun 2019

KELURAHAN	JUMLAH UMKM
TANJUNG BARAT	48
LENTENG AGUNG	107
JAGAKARSA	191
CIGANJUR	138
SRENGSENG SAWAH	223
CIPEDAK	124

TOTAL	831
-------	-----

*Sumber: Kantor Kecamatan Jagakarsa (data diolah)*

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor kecamatan Jagakarsa, sebanyak 831 pelaku UMKM yang terdaftar dalam program PKT. Dari 6 kelurahan, fokus objek penelitian ini adalah Kelurahan Lenteng Agung sebanyak 107 pelaku UMKM yang terdata dalam program PKT. Pemerintah melakukan pembinaan langsung kepada pelaku UMKM dalam beberapa tahapan, mulai dari mengurus perizinan, memasarkan penjualan, membuat pelaporan keuangan sampai pada permodalan usaha. Hal ini membuktikan bahwa permasalahan umum yang masih melekat pada pelaku UMKM ialah dalam hal perilaku keuangan. Untuk mengetahui lebih dalam, peneliti telah melakukan pra survey kepada 14 pelaku UMKM di Lenteng Agung dengan menyebarkan kuesioner, dimana diantaranya masih banyak yang belum melakukan pencatatan keuangan dengan baik, seperti membuat perencanaan dan pelaporan keuangan bulanan dengan anggapan hanya menjalankan usaha kecil sehingga cukup hanya melakukan pencatatan seadanya bahkan tanpa membuat anggaran belanja yang sesuai. Seperti yang dilakukan Kurnia pemilik usaha kuliner, rumah makan ayam goreng yang baru berdiri tahun 2018 tidak melakukan pencatatan keuangan dengan baik seperti membuat anggaran dan pelaporan keuangan bulanan, meskipun mengakui telah memisahkan antara dana usaha dan dana pribadi dengan catatan yang seadanya saja, tentu hal tersebut masih belum cukup sehingga terlihat bahwa perilaku keuangannya masih kurang baik.

Begitu pula halnya dengan tabungan dan investasi, diantaranya masih ada beberapa yang menyisihkan uangnya dan memiliki tabungan di bank untuk kemudahan transaksi dan menerima program bantuan pemerintah. Akan tetapi untuk aset investasi, mereka masih awam dan enggan melakukannya sebab kini banyak investasi fiktif yang beredar sehingga mereka takut dan berjaga-jaga untuk lebih baik tidak melakukan investasi. Padahal mereka tidak akan terjebak jika memiliki pengetahuan terkait manfaat dan risiko aset-aset investasi yang terjamin.

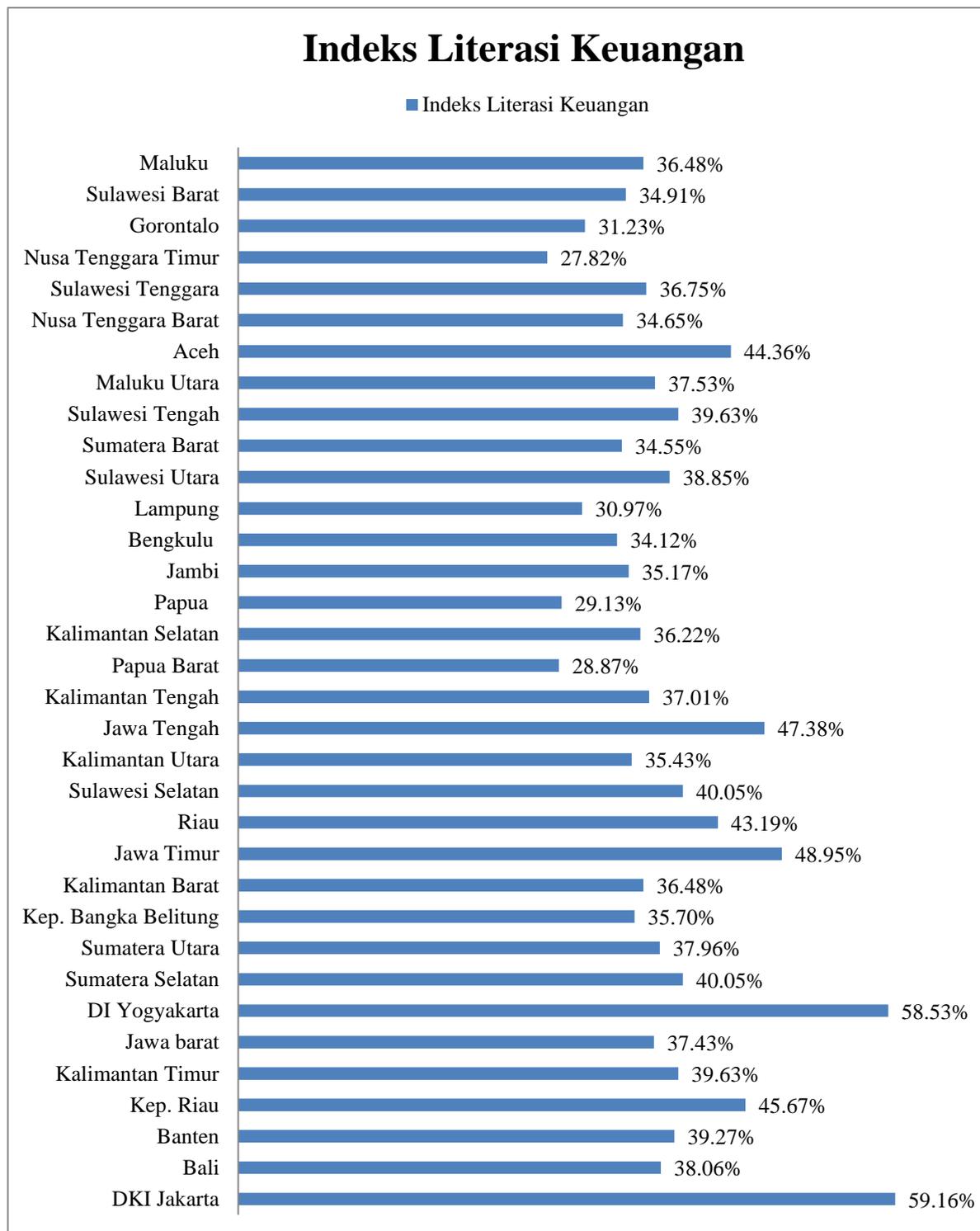
Arifin et al. (2019) mengutip dalam (Shefrin, 2000 dan Nofsinger, 2001) Perilaku keuangan menjelaskan bagaimana *psychology* manusia dalam memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan keuangan. Perilaku keuangan memiliki persepsi terkait bagaimana pola pikir masyarakat dalam pengambilan keputusan dengan meninjau dari berbagai perspektif non-ekonomi, terutama *psychology*.

Perilaku manajemen keuangan menjadi isu terkini dalam bertanggungjawab atas pengelolaan dana yang dimiliki. Hal ini juga berlaku pada pelaku usaha UMKM untuk memperhatikan terkait cara yang tepat dalam mengelola keuangan, sebab tingkat pengetahuan keuangan yang tinggi, akan membentuk pengelolaan keuangannya semakin bijak (Mulyani & Desmintari, 2020). Apalagi di era pandemi seperti ini, dibutuhkan perencanaan keuangan yang matang agar tepat dalam mengelola keuangannya, hal ini tentu harus didukung oleh pengetahuan yang baik akan literasi keuangan guna meningkatkan taraf hidup dan pendapatan. Namun, rendahnya pengetahuan dalam melakukan pengelolaan keuangan turut menjadi masalah yang kian dirasakan oleh pelaku UMKM yang berdampak pada sulitnya meminjam dana modal usaha pada lembaga keuangan disebabkan tidak adanya pelaporan keuangan atau tidak sesuai dengan standar yang ada.

Terdapat beberapa studi empiris terdahulu tentang perilaku pengelolaan keuangan dengan berbagai variabel yang mempengaruhinya. Rizkiawati & Asandimitra (2018) menyatakan terdapat tujuh variabel yang mempengaruhi perilaku manajemen keuangan individu yaitu pendapatan, jenis kelamin, usia, pengetahuan finansial, sikap finansial, locus pengendali dan *financial self-efficacy*. Sementara Humaidi et al. (2020) menggunakan variabel *Financial Technology*, *Demographics*, dan *Financial Literacy* yang menjadi faktor pengaruh *Financial Management Behavior*.

Dari variabel yang telah disebutkan diatas, *financial literacy* sebagai faktor yang memberikan pengaruh terhadap *financial management behaviour*. Mengutip Otoritas Jasa Keuangan (2017), “Literasi keuangan

merupakan *knowledge, skill, dan confidence* yang memberikan pengaruh antara sikap dan perilaku dalam meningkatkan mutu pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.” Dari hasil survey Otoritas Jasa Keuangan (2019) Literasi keuangan Indonesia berada pada angka 38,03%. Meskipun telah meningkat dari hasil survey tahun 2016 yakni 29,7% tetapi secara nasional masih tergolong rendah dibandingkan negara lain di ASEAN. Seperti di negara Malaysia literasi keuangannya sebesar 85%, Thailand berada di angka 82% dan Singapura 98%. Hal ini menunjukkan penduduk di negara lain memiliki wawasan dan pemahaman terkait lembaga jasa keuangan beserta produknya produk sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupannya. (suara.com)



Sumber: *Lifepal.co.id* yang diolah dari data OJK 2019

**Gambar 2. Grafik Indeks Literasi Keuangan Masyarakat Indonesia Tahun 2019 Berdasarkan Provinsi**

Dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan OJK (2019) berdasarkan provinsi, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan indeks tertinggi dan berada di atas rata-rata nasional, yakni mencapai 59,16%. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa warga DKI Jakarta mempunyai pengetahuan terkait produk-produk finansial yang baik dibanding provinsi lain di Indonesia. Diikuti dengan 13 provinsi lainnya yang juga memiliki indeks literasi di atas rata-rata nasional. Sisanya sebanyak 20 provinsi indeks literasi keuangannya masih di bawah rata-rata nasional.

Namun, hasil SNLIK OJK 2019 berbeda dengan hasil observasi pra riset yang telah dijalankan peneliti kepada 14 pelaku UMKM, dimana sebagian besar dari mereka masih banyak yang tidak menggunakan layanan jasa keuangan karena takut akan risiko dan tidak mengetahui bagaimana meminjam modal usaha di perbankan, padahal banyak perbankan yang memiliki program dalam mensejahterakan UMKM melalui peminjaman modal usaha. Begitu pula dengan produk-produk keuangan lainnya yang masih minim diketahui terkait hak, kewajiban, manfaat maupun risikonya. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi Ajib Hamdani (2020) yakni perlu adanya monitoring dan evaluasi terkait pemberian insentif UKM melalui kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan mengingat rendahnya literasi keuangan pelaku UMKM, meskipun tetap menjadi penopang PDB sebesar 60,34% (nasional.kontan.co.id).

Permasalahan yang terjadi pada pelaku UMKM ialah rendahnya pengetahuan keuangan. Dimana dalam penelitian sebelumnya, Hamdani (2018), Andarsari & Ningtyas (2019), dan Humaidi et al. (2020) Literasi keuangan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan pada perilaku keuangan, berbeda halnya dengan (Harahap et al., 2020; Rizkiawati & Asandimitra, 2018; Yap et al., 2016) literasi keuangan yang menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan.

Tingkat pendapatan termasuk variabel yang dapat mempengaruhi *financial behavior management*. Pendapatan UMKM turut dipengaruhi

karena adanya pandemi akibat wabah Covid-19 saat ini. Menurunnya pendapatan UMKM di masa pandemi ini menyadarkan mereka akan pengelolaan keuangan yang tepat sangat penting. Karena selama ini, banyak para pelaku UMKM yang hanya berfokus pada peningkatan pendapatan dan keuntungan tanpa mengetahui produk keuangan lainnya untuk pengembangan usaha seperti investasi maupun pinjaman modal.

Namun, sebagian pelaku UMKM sudah mulai hidup kembali berkat mendapat bantuan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan program pemerintah. Seperti yang dikemukakan Ghita Argasasmita (2020) sebagai Penasihat keuangan dan pendiri *Integrita Financial*, untuk mendirikan bisnis yang matang dan berkepanjangan, perlu adanya perilaku yang bijak dalam manajemen finansial, seperti mencatat pemasukan dan pengeluaran, membuat neraca, serta membuat laporan rugi/laba bisnisnya, sehingga data laporan keuangan tersebut dapat membantu pelaku UMKM untuk pengambilan keputusan terkait penambahan biaya modal usaha melalui lembaga finansial guna mempertahankan bisnis dari keadaan ketidakstabilan ekonomi saat ini (money.kompas.com).

Permasalahan terkait pendapatan ialah menurunnya pendapatan membuat modal usaha berkurang dan tidak dapat melakukan pinjaman modal melalui perbankan karena tidak memiliki pelaporan keuangan yang sesuai, sehingga aktivitas bisnisnya terhambat dan pengelolaan keuangannya masih buruk. Arifin (2017), Rizkiawati & Asandimitra (2018), Alexander & Pamungkas (2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pendapatan tidak memiliki pengaruh dan negatif terhadap perilaku keuangan. Berbeda halnya dengan Yusnia & Jubaedah (2017), Arifin et al. (2019), Fatimah & Susanti (2018), dan Aji et al. (2020) Pendapatan memiliki pengaruh dan positif terhadap perilaku keuangan.

Faktor lain yang dapat menjadi pengaruh terhadap perilaku manajemen keuangan adalah sikap keuangan. Ketidakpastian dalam memperoleh pendapatan di saat pandemi turut menjadi faktor dalam

pembentukan sikap keuangan individu dalam perilaku manajemen keuangan. Menurut Culbertson (1968) dalam (Yap et al., 2016) Sikap ialah kecenderungan dalam berperilaku dengan sebuah keyakinan bahwa objeknya baik atau buruk. Sikap keuangan menurut Yap et al. (2016) dipengaruhi oleh cara kerja seseorang dalam mengambil keputusan terhadap keuangan yang dianggap baik atau buruk sesuai perspektif diri sendiri maupun orang lain serta tak luput dari pengalaman itu sendiri. Dengan mempunyai sikap positif dalam pengambilan keputusan terkait masalah finansial, maka pola tatanan manajemen keuangannya juga akan tepat. Arifin et al. (2019), Yap et al. (2016) dan Beribe et al. (2020) sikap keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku keuangan, berbeda dengan (Lianto & Elizabeth, 2017; Rizkiawati & Asandimitra, 2018) bahwa sikap keuangan berpengaruh negatif terhadap perilaku manajemen keuangan.

*Fintech* dapat pula mempengaruhi perilaku manajemen keuangan. Wahyudi et al. (2020) mendefinisikan *financial technology* sebagai sebuah inovasi bidang pelayanan keuangan dalam memanfaatkan teknologi. Dalam penelitian ini *financial technology* dijadikan sebagai variabel intervening yang menghubungkan langsung antara literasi keuangan, pendapatan, dan sikap keuangan terhadap perilaku manajemen keuangan.

Teten Masduki (2020) Menteri Koperasi & UKM, menerangkan bahwa banyak para UMKM yang tidak terjalin dengan sektor perbankan, sebab mereka tidak mampu melengkapi syarat & ketentuan layanan perbankan, seperti laporan data keuangan usaha. Ia menambahkan, kurang-lebih sebanyak 16% atau 10,2 juta UMKM sudah terjalin dengan *platform digital*. Akan tetapi, permasalahan pokok yang dialami yaitu laporan keuangan usaha. Selain itu, adanya pandemi Covid-19 saat ini menyebabkan pelaku UMKM kehabisan dana karena kelelahan untuk mempertahankan usahanya dari kebangkrutan. Hal ini membuat mereka memerlukan tambahan modal yang mudah dan berbunga rendah.

Hadirnya *Financial Technology* membuahkan suatu harapan bagi pelaku UMKM di Indonesia dalam memperluas bisnisnya. *Fintech* menjadi solusi atas permasalahan keuangan terkait modal dan biaya,

melalui kemudahan program bantuan kredit dengan *Fintech*, terutama pelaku UMKM yang perlu berkembang (Ningsih, 2020).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi et al.(2020) *fintech* tidak berpengaruh terhadap perilaku keuangan, berbeda halnya dengan (Humaidi et al., 2020) yang menyatakan bahwa *fintech* berpengaruh terhadap perilaku manajemen keuangan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, peneliti tertarik untuk menguji sejauh mana literasi keuangan, pendapatan dan sikap keuangan terkait dengan perilaku manajemen keuangan para pelaku bisnis UMKM di daerah DKI Jakarta, khususnya Kelurahan Lenteng Agung dimana menggunakan *financial technology* sebagai variabel intervening dengan mengangkat judul **“Determinan Perilaku Manajemen Keuangan UMKM di Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa DKI Jakarta.”**

## I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah peneliti paparkan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apakah terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku manajemen keuangan pelaku UMKM di Kelurahan Lenteng Agung?
- b. Apakah terdapat pengaruh pendapatan terhadap perilaku manajemen keuangan pelaku UMKM di Kelurahan Lenteng Agung?
- c. Apakah terdapat pengaruh sikap keuangan terhadap perilaku manajemen keuangan pelaku UMKM di Kelurahan Lenteng Agung?
- d. Apakah terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku manajemen keuangan pelaku UMKM di Kelurahan Lenteng Agung melalui *financial technology*?
- e. Apakah terdapat pengaruh pendapatan terhadap perilaku manajemen keuangan pelaku UMKM di Kelurahan Lenteng Agung melalui *financial technology*?

- f. Apakah terdapat pengaruh sikap keuangan terhadap perilaku manajemen keuangan pelaku UMKM di Kelurahan Lenteng Agung melalui *financial technology*?

### I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat adanya pengaruh antara variabel literasi keuangan, pendapatan dan sikap keuangan terhadap Perilaku Keuangan pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Lenteng Agung. Adapun rincian tujuan penelitian sebagaimana rumusan masalah diatas sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Literasi Keuangan terhadap Perilaku Manajemen Keuangan pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa DKI Jakarta.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan terhadap Perilaku Manajemen Keuangan pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa DKI Jakarta.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sikap Keuangan terhadap Perilaku Manajemen Keuangan pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa DKI Jakarta.
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Literasi Keuangan terhadap Perilaku Manajemen Keuangan pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa DKI Jakarta melalui *Financial Technology* sebagai variabel intervening.
- e. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan terhadap Perilaku Manajemen Keuangan pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa DKI Jakarta melalui *Financial Technology* sebagai variabel intervening.

- f. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sikap Keuangan terhadap Perilaku Manajemen Keuangan pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa DKI Jakarta melalui *Financial Technology* sebagai variabel intervening.

#### **I.4 Manfaat Penelitian**

Berlandaskan tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan, pemahaman dan informasi bagi pembaca serta menjadi referensi bagi perkembangan perilaku dalam mengelola keuangan untuk menambah pengetahuan literasi keuangan, pendapatan, sikap keuangan, dan *financial technology* serta sebagai penyempurnaan dari penelitian sebelumnya dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada para pelaku UMKM Lenteng Agung dalam mempelajari dan menerapkan pengelolaan keuangan dengan baik seperti membuat pencarian, penganggaran, perencanaan, pemeriksaan, pengendalian, dan penyimpanan keuangan demi keberlanjutan perkembangan usaha mereka.